

**“RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karuniaNYA, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam menyusun Rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (RENJA BAPPERIDA) merupakan dokumen rencana kerja resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Selain itu Renja tahun 2025 merupakan renja tahun ketiga dalam periode RPD2023-2026.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini guna membantu meningkatkan kinerja BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur di masa mendatang sangat kami harapkan.

Larantuka, Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Apolonia Corebima, S.E, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196907181997032002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
PERATURAN BUPATI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.2 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPERIDA.....	18
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi.....	20
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BAPPERIDA.....	36
3.3 Program dan kegiatan.....	38
 BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN.....	40
 BAB V PENUTUP.....	51

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.....	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	22
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPERIDA Tahun 2025.....	37
Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA Tahun 2025	38
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	39
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	41



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2025.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terkur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencanan belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat rencana Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2025.

- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V penutup.
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPERIDA.
- (3) Kepala BAPPERIDA melakukan evaluasi RKPD Tahun 2025 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 6 Agustus 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 6 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

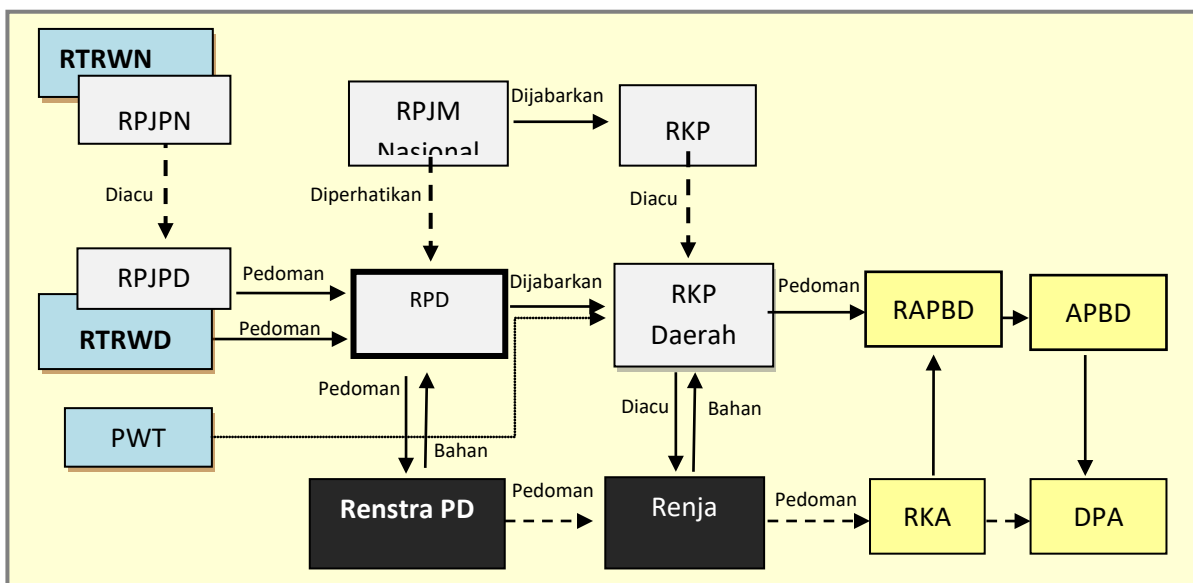
Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keterkaitan Renja PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 55870, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
11. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur;
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2023-2026
18. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2025 yang merupakan penjabaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja tahun 2025 adalah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah pada fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI

DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2024 sebagaimana digambarkan pada Tabel II.1 berikut: (tabel excel 2.1 new)

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Flores Timur
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Flores Timur

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target RENSTRA (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah n-3(2023)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan		K et.
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					<i>Target Kinerja RENJA Tahun 2023</i>	<i>Realisasi Capaian Kinerja RENJA Tahun 2023</i>	<i>Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2023 (%)</i>		<i>Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)</i>	<i>Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)</i>	
1					2	3	4	5	6	7	8=6/7	9	10=5+7+9	11=10/4	

5.1 .	5.1 .	0.0	02		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		-				95,08	-	100	86	
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100	-	-	-	-	100	100	100	
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	-	100	100	100	100	100	100	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	78	-	100	100	100	73,20	73,20	73	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	92	-	53,8	54	100	73,08	73,08	79,17	
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	-	100	100	100	100	100	100	

X	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	50	-	-	13	100	12	25	50	
X	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	-	2	2	100	2	4	44	
X	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8	-	2	2	100	2	4	50	
X	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	17	-	5	5	100	4	9	53	
X	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	-	4	4	100	4	8	50	
X	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	12	-	3	3	100	3	6	50	
X	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	14	-	24/14	12	100	26/14	26/14	100	
X	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	4	-	-	-		1	1	25	
X	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	-	1	1	100			-	

X	XX	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	-	-			5	5	63	
X	XX	01	2.02	07	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen)	8	-	2	2	100	2	4	50	
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	39	-	-	-	-	9	9	23	
X	XX	01	2.02	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang daerah milik SKPD (Dokumen)	3	-	-	-		1	1	33	
				05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	-	-	-		2	2	17	
X	XX	01	2.02	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	24	-	6	6	100	6	12	50	
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	-	-	-		-	-	-	
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan admonistrasi kepegawaian (Dokumen)	4	-	1	1	100	1	2	50	
X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	51	-	12	12	100	13	25	49	

X	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)</i>	9	-	-					-	
X	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan administrasi umum PD (%)</i>	100	-	100			100	100	100	
X	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)</i>	3	-	3	3	100	3	3	100	
X	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka (paket)</i>	3	-	4	4	100	3	3	100	
X	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)</i>	4	-	4	4	100	4	4	100	
X	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan(paket)</i>	5	-	3	3	100	5	5	100	
X	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)</i>	3	-	3	3	100	3	3	100	
X	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>	48	-	12	12	100	12	12	25	
X	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>	8	-	1	1	100	2	2	25	
X	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</i>	48	-	12	12	100	12	12	25	
X	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	3	-	-			1	1	33	
X	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</i>	3	-	-			1	1	33	

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	78	-	100	100	100	100,00	100,00	73,17	
X	XX	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)</i>	2	-		-				-	
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	<i>Tersedianya mebeleur yang diadakan (unit)</i>	13	-		-				-	
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	12	-	8	8	100	3	3	25	
X	XX	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	<i>Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	1	-		-				-	
X	XX	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	3	-		-				-	
X	XX	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	5	-	4	4	100			-	
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>	100	-	100	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	48	-	12	12	100	12	12	25	
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	48	-	12	12	100	12	12	25	
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>	48	-	12	12	100	12	12	25	
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</i>	91	-	100	100	100	100	100	110	

X	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	-	18	18	100	18	18	100	
X	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	73	-		-		5	5	7	
X	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	26	-		-		10	10	38	
X	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	-		-				-	
X	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	-	1	1	100	1	1	100	
X	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	71	-	12	12	100	66	66	93	
X	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	3	-	1	1	100	1	1	33	
										-	-	-	-				
5	01				Perencanaan					-	-	-	-				
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					-	-	-	-				
								Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	-	100	68,54	68,54	100	100	100	
								Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100	-	100	93,60	93,60	100	100	100	

5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	10	-	3	3	-	3	6	60	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	6	-	2	2	100,00	2	4	67	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)	4	-	2	2	100,00	1	3	75	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota (berita acara)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)	1.800	-	1.600	2.910	181,88	1.600	4.510	251	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD (Dokumen)	10	-	2	2	100,00	3	5	50	
5	01	02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	4	-	1	-	-	1	1	25	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	-	1	1	100,00	1	2	200	

5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)	100	-	100	-	-	100	100	100	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	17	-	3	3	100,00	2	5	29	
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerjasama)	16	-	13	13	100,00	13	26	163	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (laporan)	8	-	4	4	100,00	5	9	113	
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	8	-	2	-	-	2	2	25	
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)	100	-	100	94	93,60	100	100	100	

5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100	-	100	95	95,16	100	100	100	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	13	-	13	13	100,00	13	13	100	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)	4	-	1	1	100,00	1	1	25	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	

5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)</i>	6	-	6	6	100,00	6	6	100	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah)</i>	6	-	6	6	100,00	6	6	100	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)</i>	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang perekonomian dan SDA (%)</i>	100	-	100	98	97,78	100	100	100	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (Dokumen)</i>	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)</i>	4	-	4	4	100,00	4	4	100	

5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	-	4	4	100,00	4	4	100	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD (Dokumen)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	5	-	5	5	100,00	5	5	100	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	5	-	5	5	100,00	5	5	100	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan DaerahBidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	

5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase konsistensi program <i>RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)</i>	100	-	100	76	76,47	100	100	100	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (Dokumen)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	4	-	4	4	100,00	4	4	100	
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	4	-	4	4	100,00	4	4	100	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)	4	-	1	1	100,00	1	2	50	
5	05				Penelitian dan Pengembangan			-	-	-	-				
5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			-	-	-	-				
						Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	5	-	1	1	100	1	2	40	
						Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	12	-	3	3	100	3	6	50	

					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		1	-	-	-	-	-	-	-	
					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1	-	1	1	100			-	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi (Dokumen)	4	-	-	-	-	-	-	-	
					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	-	-	-	-			-	
					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1	-	-	-	-			-	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1	-	1	1	100			-	
					Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	-	-	-	-	1	1	100	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	12	-	3	3	100	3	6	50	
				01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	12	-	3	3	100	3	6	50	

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2023-2026. Kondisi ini mengakibatkan ada perbedaan pada target dan indikator program serta sub kegiatan. Hasil pelaksanaan Renja 2023 dan pencapaian Renstra perangkat daerah sampai dengan tahun 2023 dapat dicermati pada Tabel II.1 dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi kinerja yang tidak memenuhi target kinerja pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah karena adanya keterbatasan anggaran dan penentuan skala prioritas dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah serta adanya penyesuaian terhadap kebijakan pusat sehingga indikator kinerja pada program ini tidak terpenuhi sesuai target. Walaupun demikian, capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena sudah semakin ditingkatkan upaya menjalin koordinasi dan kerjasama yang terus menerus baik secara lintas bidang maupun secara lintas sektoral
- b. Realisasi kinerja sebagian besar program pada tahun 2023 relatif terpenuhi.
- c. Realisasi kinerja yang melebihi target kinerja pada beberapa sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dimana jumlah usulan yang terverifikasi semakin meningkat.
- d. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adanya keterbatasan anggaran dan penentuan skala prioritas dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah serta adanya penyesuaian terhadap kebijakan pusat. Faktor penyebab tercapainya target kinerja diantaranya tersedianya sumber daya manusia dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, adanya rencana pelaksanaan kegiatan serta adanya kerjasama dengan banyak pihak baik secara internal maupun lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan. Faktor penyebab realisasi kinerja melebihi target pada sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dimana jumlah usulan yang terverifikasi semakin meningkat.
- e. Implikasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya capaian kinerja dari rencana yang sudah ditetapkan dalam renstra yakni
 - Belum tersedianya aparatur yang memiliki kapasitas memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Komposisi dan kapasitas aparatur pada BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur belum memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai aparatur perencana serta riset dan inovasi daerah . Selain secara jumlah masih mengalami kekurangan dan secara

kapasitas juga belum memadai karena sebagian besar pejabat fungsional belum mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional serta belum tersedianya tenaga peneliti.

- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung perencanaan dan penganggaran terutama adanya tuntutan penggunaan teknologi dan informasi dalam perencanaan yang semakin kompleks.
 - Lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan Daerah
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut yakni perlu adanya pengalokasian anggaran berdasarkan analisa kebutuhan terutama yang berkaitan dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang berdampak pada capaian evaluasi secara renja maupun secara renstra serta penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dengan selalu memperhatikan capaian kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada table II.2 berikut ini:

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Flores Timur

No	Indikator	SPM/Stand ar Nasional	IKU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026										
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		√	100%	100%	100%	93,6		100%	100 %	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke RKPD t mencapai 100 % karena tahun 2023 merupakan awal pelaksanaan RPD 2023-2026.
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)		√	100%	100%	100%	100%		100%	100 %	
3	Jumlah hasil kelitbangan		√	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok		1 dok	1 dok	Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan judul Studi kelayakan RS Pratama Solor serta kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan judul Grand Design Pemetaan Kawasan Food Estate di Kabupaten Flores Timur. Penelitian yang telah dimanfaatkan yakni Studi kelayakan RS Pratama Solor yang telah digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan DAK untuk RS Pratama Solor pada tahun 2024.
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)		√	100%	100%	100%	57,14%		100%	100 %	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah belum mencapai 100 % karena belum semua kebijakan inovasi diterapkan di daerah.
	Indikator Kinerja Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan Penunjang sesuai Permendagri 86 Tahun 2017										
Penunjang Urusan											
1	Perencanaan Pembangunan										
01:01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		√	ada	ada	ada	ada		ada	ada	Dokumen RPJPD 2005-2025 masih berlaku sedangkan untuk RPJPD 2025-2045 sedang dalam proses penyusunan dan penetapan PERDApada tahun 2024

01:02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		√	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Dokumen RPJMD sudah tersedia dan masih berlaku. Untuk tahun 2023-2026 menggunakan RPD 2023-2026
01:03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		√	ada	ada	ada	ada		ada	ada	Dokumen RKPD dihasilkan setiap tahun
01:04	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		√	100%	100%	100%	93,6		100%	100 %	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke RKPD tidak mencapai 100 % karena dipengaruhi oleh penyesuaian anggaran terhadap prioritas pembangunan.
01:05	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		√	100%	100%	100%	100,00		100%	100 %	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke APBD mencapai 100 karena dilakukan penyesuaian pada perubahan RKPD
4	Penelitian dan Pengembangan										
04:01	Persentase implementasi rencana kelitbangan.		√	100%	100%	100%	100%		100%	100 %	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah belum mencapai 100 % karena belum semua kebijakan inovasi diterapkan di daerah.
04:02	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.		√	100%	100%	100%	50		100%	100 %	
	Penerapan SIDA										
04:03	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.		√	9,37	12,5	15,6	14,28		12,5	15,6	
04:04	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.		√	100%	100%	100%	57,14%		100%	100 %	

Dari tabel II.2 dapat diketahui bahwa untuk penunjang urusan perencanaan pembangunan, ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada indikator kinerja tahun 2023 ada, karena dokumen tersebut telah tersedia pada tahun sebelumnya. Selain ketersediaan dokumen perencanaan, penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tahun 2023 sebesar 93,6 % karena jumlah program pada RPD periode tahun 2023 sebanyak 125 program, yang kemudian mengalami perubahan pada perubahan RKPD tahun 2023 menjadi 117 program. Kondisi ini diakibatkan karena adanya keterbatasan anggaran dan penentuan skala prioritas dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah serta adanya penyesuaian terhadap kebijakan pusat.

Selain urusan perencanaan, BAPPERIDA juga melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan daerah. Untuk tahun 2023 BPPPPD menyelenggarakan 2 penelitian. yakni kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan judul Studi kelayakan RS Pratama Solor serta kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan

dan Pangan dengan judul Grand Design Pemetaan Kawasan Food Estate di Kabupaten Flores Timur. Penelitian yang telah dimanfaatkan yakni Studi kelayakan RS Pratama Solor yang telah digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan DAK untuk RS Pratama Solor pada tahun 2024. Untuk penerapan SIDA belum mencapai target karena masih rendahnya penerapan inovasi di daerah.

.2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Berdasarkan hasil evaluasi renja dan renstra perangkat daerah serta analisis kinerja pelayanan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan stakeholder pembangunan, tentu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain,:

- a. Proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta dokumen yang dihasilkan belum optimal yang mengakibatkan rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan.
- b. Belum adanya dukungan data yang memadai berbasis teknologi informasi yang mengakibatkan rendahnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi disebabkan oleh penyusunan dokumen perencanaan belum berkualitas (target dan sasaran tidak jelas, tidak terukur), tidak partisipatif dan tidak tepat waktu.
- c. Belum adanya sistem pengembangan SDM perencanaan dan penelitian serta analisis kebijakan yang terintegrasi dan konsisten, serta kurangnya respon terhadap posisi evaluasi, penelitian dan kajian serta inovasi dalam proses perencanaan mengakibatkan lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam penyusunan dokumen Renja ini mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025.

BAPPERIDA sebagai sebuah lembaga teknis daerah yang bertugas membantu pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah yang mengemban tujuan/sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang ke 4 (empat) yakni , ***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***, dengan sasaran ***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pemerintahan pelayanan publik***.

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah membutuhkan perhatian yang lebih serius dan lebih fokus karena ada tantangan yang akan dihadapi antara lain:

1. Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan selalu berubah-ubah;
2. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan semakin menurun.
3. Kebutuhan data dan informasi untuk perencanaan semakin kompleks.
4. Terbatasnya kewenangan pejabat perencana pada masing-masing OPD
5. Koordinasi yang belum maksimal antar OPD (*ego sector*)
6. Tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan.

Sedangkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya koordinasi dan pendampingan dari pemerintah tingkat pusat dan provinsi semakin intens.
2. Berlakunya Undang-Undang Desa yang memberi kewenangan perencanaan dan penganggaran pada desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Penggunaan aplikasi data dan informasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Adanya perubahan struktur dan tata kerja organisasi
5. Pelaksanaan forum lintas sektor.
6. Peningkatan kapasitas ASN

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur, maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan
2. Rendahnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi
3. Lemahnya fungsi penelitian dan pengembangan Daerah

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antar rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra perangkat daerah dengan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan hasil konsultasi publik.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2025 dilakukan dengan mengidentifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan BAPPERIDA sebagai bahan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, namun terdapat perbedaan jumlah sub kegiatan, anggaran dan kinerja antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Selain adanya penambahan anggaran pada hasil analisis dikarenakan oleh adanya penambahan volume target kinerja, bertambahnya anggaran juga dipengaruhi oleh standar biaya yang semakin meningkat pada tahun 2025. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini :

Tabel. II.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATO R PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (Satuan)	Target	Pagu Indikatif	Catatan penting	
								K	Rp				K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5-1	5-4	0-0	02		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				6.366.954.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				6.546.954.500		
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Larantuka			3.607.688.350	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Larantu ka			3.607.688.350		
						Larantuka	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	162.780.000		Larantu ka	Persentase Perencanaaa n dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	162.780.000		
						Larantuka	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100,0	270.363.600		Larantu ka	Persentase Ketersediaaa n Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	73,2	270.363.600		

						Larantuka	<i>Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)</i>	53,8	65.000.000		Larantuka	<i>Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)</i>	53,8	65.000.000	
							<i>Tingkat Pelayanan Administrasi</i>	100				<i>Tingkat Pelayanan Administrasi</i>	100		
							<i>Perkantoran (%)</i>					<i>Perkantoran (%)</i>			
x	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)</i>	13	60.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)</i>	13	60.000.000	
x	xx	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)</i>	3	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)</i>	3	25.000.000	Renstra, Renja 2026, perubahn Renja 2025
x	xx	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)</i>	2	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)</i>	2	10.000.000	
x	xx	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)</i>	4	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil</i>	4	10.000.000	LAKIP, LKPJ, LPPD dan RKT

												Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(lapor an)				
x	xx	01	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	4	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Larantu ka/OPD, Kab Flores Timur)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Lap oran)	4	15.000.000	Laporan eval renja Triwulan 1,2,3,4
x	xx	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Larantuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	3	2.834.025.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Larantu ka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	3	2.834.025.800	
x	xx	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	24/14 Orang/ bulan	2.731.245.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Larantu ka/OPD, Kab Flores Timur)	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	32/14 Orang/ bulan	2.731.245.800	P3K yang baru?
x	xx	01	2,02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Larantuka	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	87.780.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Larantu ka/OPD, Kab Flores Timur)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	87.780.000	

x	xx	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD</i>	2	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>(Larantu ka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD</i>	2	15.000.000	
			2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Larantuka</i>	<i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)</i>	3	29.998.950	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Larantu ka</i>	<i>Jumlah laporan penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)</i>	3	29.998.950	
				01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Larantuka	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(dok)</i>	1	9.999.510	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>(Larantu ka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(dok)</i>	1	9.999.510	
				05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2	9.999.750	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>(Larantu ka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2	9.999.750	

				06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		<i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	4	9.999.690	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	4	9.999.690	
x	xx	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Larantuka</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i>	<i>2 Orang</i>	<i>65.000.000</i>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Larantuka</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i>	<i>2 Orang</i>	<i>65.000.000</i>	
x	xx	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Larantuka</i>	<i>Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan admonistrasi kepegawaian (dokiumen)</i>	1 Dokum en	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan admonistrasi kepegawaian (dokiumen)</i>	1 Dokum en	5.000.000	
x	xx	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Larantuka</i>	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	13 Dokum en	10.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	13 Dokum en	10.000.000	SKP termasuk Perjanjian Kinerja tahun 2025
x	xx	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Larantuka</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 Orang	40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 Orang	40.000.000	Diklat dilakukan secara bertahap

x	xx	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000				2 Orang	10.000.000	Disesuai kan dengan prioritas kebutuha n
x	xx	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Larantuka	Persentase pemenuhan administrasi umum PD(%)	100	184.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Larantu ka	Persentase pemenuhan administrasi umum PD(%)	100	184.000.000	
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Larantu ka/OPD, Kab Flores Timur)	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3 Paket	3.000.000	
x	xx	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan)	3 Paket	7.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Larantu ka/OPD, Kab Flores Timur)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap a n Kantor yang Disediakan)	3 Paket	7.000.000	
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Larantu ka/OPD, Kab Flores Timur)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	
x	xx	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan	5 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Larantu ka/OPD, Kab Flores Timur)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan	5 Paket	30.000.000	
x	xx	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	3 Paket	37.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(Larantu ka/OPD, Kab Flores Timur)	Jml paket barang cetak dan pengganda a n (paket)	3 Paket	37.000.000	

x	xx	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	2.000.000	
x	xx	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>	2 Laporan	35.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>	2 Laporan	35.000.000	
x	xx	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	55.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>(Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	55.000.000	
				10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	5.000.000	
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	5.000.000	
x	xx	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Larantuka	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Larantuka	Persentase Ketersediaan Sarana & Prasarana Aparatur (%)		50.000.000	

				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	50.000.000	laptop dan infokus
x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>	100	164.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>	100	164.300.000	
x	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	12 Laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)</i>	12 Laporan	1.500.000	
x	xx	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)</i>	12 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)</i>	12 Laporan	80.000.000	
x	xx	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>	12 Laporan	82.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>	12 Laporan	82.800.000	

x	xx	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Larantuka	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>		220.363.600		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Larantuka	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>		220.363.600	
x	xx	01	2,09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	18 Unit	60.990.250		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	18 Unit	60.990.250	
x	xx	01	2,09	05		Pemeliharaan Mebel	Larantuka	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	5 Unit	3.000.000		Pemeliharaan Mebel	(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	5 Unit	3.000.000	
x	xx	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)</i>	15 Unit	10.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)</i>	15 Unit	10.000.000	

x	xx	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	<i>Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)</i>	1 Unit	34.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)</i>	1 Unit	34.000.000	
x	xx	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)</i>	12 Unit	7.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)</i>	12 Unit	7.000.000	
x	xx	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara(unit)</i>	3 Unit	105.373.350	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>(Larantuka/OPD, Kab Flores Timur)</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara(unit)</i>	3 Unit	105.373.350	
5	01				Perencanaan					Perencanaan					
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Larantuka, seluruh Kecamatan	<i>Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)</i>	100	1.827.276.150 214.800.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Larantuka, seluruh Kecamatan	<i>Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)</i>	100	1.827.276.150 214.800.000	

						Larantuka, Kupang, Jakarta	<i>Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)</i>	100	1.612.476.150		Larantuka, Kupang, Jakarta	<i>Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)</i>	100	1.612.476.150	
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	<i>3dokumen (RKPD Penetapan 2026 dan Perubahan RKPD 2025, RPJMD)</i>	1.410.280.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	<i>3 dokumen (RKPD Penetapan 2025 dan Perubahan RKPD 2024, RPJPD)</i>	1.410.280.000	
5	01	02	2,01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Larantuka, Kupang, Jakarta	<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)</i>	2 Dokumen	98.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Larantuka, Kupang, Jakarta	<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)</i>	2 Dokumen	98.000.000	Ranwal RPJMD dan Ranwal RKPD 2026
5	01	02	2,01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Larantuka, Kupang, Jakarta	<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (dok)</i>	1 Dokumen	51.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Larantuka, Kupang, Jakarta	<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (dok)</i>	1 Dokumen	51.000.000	

5	01	02	2,01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Laarantuka	<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)</i>	2 Berita Acara	41.480.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	<i>Laarantu ka</i>	<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)</i>	2 Berita Acara	41.480.000	RKPD 2026 dan RPJMD
5	01	02	2,01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Larantuka	<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)</i>	2Berita Acara	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	<i>Larantuk a</i>	<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)</i>	2Berita Acara	35.000.000	RKPD 2026 dan RPJMD
5	01	02	2,01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab Flores Timur	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota</i>	2 Berita Acara	183.800.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	<i>19 Kecamatan, Larantuka, dan Luar Daerah</i>	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota</i>	2 Berita Acara	183.800.000	RKPD 2026 dan RPJMD
5	01	02	2,01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laarantuka	<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)</i>	1.800 Usulan	31.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	<i>19 Kecamatan, Kab Flores Timur</i>	<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)</i>	1.800 Usulan	31.000.000	
5	01	02	2,01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD</i>	3 Dokumen	970.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD</i>	3 Dokumen	970.000.000	3dokumen (RKPD Penetapan 2026 dan Perubahan RKPD 2025, RPJMD)
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>	<i>1 buku profil</i>	<i>69.996.150</i>	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		<i>Jml Buku Profil Pembangunan Daerah g Diterbitkan</i>	<i>1 buku profil</i>	<i>69.996.150</i>	

5	01	02	2,02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>	1 Buku	69.996.150	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Larantuka</i>	<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>	1 Buku	69.996.150	
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		<i>Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)</i>	100	217.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		<i>Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)</i>	100	217.000.000	
5	01	02	2,03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Larantuka, Kupang	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	4 Laporan	80.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	<i>Larantuka, Kupang</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	4 Laporan	80.000.000	
5	01	02	2,03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Larantuka	<i>Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (kerja sama)</i>	15 Kerja Sama	60.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	<i>Flores Timur</i>	<i>Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaan nya (kerja sama)</i>	15 Kerja Sama	60.000.000	
5	01	02	2,03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Larantuka, Kupang, Jakarta</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(laporan)</i>	2 Laporan	77.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Flores Timur, Kupang, Jakarta</i>	<i>Jml Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(laporan)</i>	2 Laporan	77.000.000	

5	01	02	2,04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dok)	2 dok	130.000.000	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dok)	2 dok	130.000.000	
5	01	02	2,04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (dok)	1 Dokumen	45.000.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Flores Timur, Kupang, Jakarta	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (dok)	1 Dokumen	45.000.000	
5	01	02	2,04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dok)	1 Dokumen	85.000.000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Flores Timur, Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dok)	1 Dokumen	85.000.000	
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					

							<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)</i>	100	<i>561.990.000</i>			<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)</i>	100	<i>561.990.000</i>	
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)</i>	100	270.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)</i>	100	270.000.000	
5	01	03	2,01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	40.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	40.000.000	
5	01	03	2,01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	13 Laporan	20.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Larantuka	Jml Perangkat Daerah yg Dilakukan Asistensi dlm Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	13 Laporan	20.000.000	

5	01	03	2,01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)	1 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19 Kecamatan, Kabupaten Flores Timur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)	1 Laporan	20.000.000	
5	01	03	2,01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	1 Laporan	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dalam dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	1 Laporan	35.000.000	
5	01	03	2,01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dalam dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	35.000.000	

5	01	03	2,01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	6 Laporan	20.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Larantuka	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	6 Laporan	20.000.000	
5	01	03	2,01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah)	6 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Larantuka	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah)	6 Laporan	20.000.000	
5	01	03	2,01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1 Laporan	80.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1 Laporan	80.000.000	Koordinasi untuk kemiskinan ekstrim dan stunting

5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang perekonomian dan SDA (%)</i>	100	170.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang perekonomian dan SDA (%)</i>	100	170.000.000	
5	01	03	2,02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	1 Dokumen	35.000.000	
5	01	03	2,02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	15.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Larantuka	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	15.000.000	
5	01	03	2,02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	15.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Larantuka	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Laporan	15.000.000	

5	01	03	2,02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	25.000.000	
5	01	03	2,02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	35.000.000	
5	01	03	2,02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Laporan	15.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Larantuka	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Laporan	15.000.000	
5	01	03	2,02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Laporan	15.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Larantuka	Jml Perangkat Daerah yg Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Laporan	15.000.000	

5	01	03	2,02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	15.000.000	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	121.990.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	121.990.000	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)	1 Dokumen	35.000.000	
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	15.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Larantuka	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	15.000.000	

5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	15.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Larantuka	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Laporan	15.000.000	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Larantuka, Kupang, Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	56.990.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	56.990.000	
5	05				Penelitian dan Pengembangan					Penelitian dan Pengembangan					
5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				370.000.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				550.000.000	
							Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	220.000.000			Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	400.000.000	
		02	2,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)	3	150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)	3	150.000.000	

		02	2,01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>	1 Laporan	20.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>	1 Laporan	200.000.000	Survey indeks ???
5	05	02	2,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		<i>Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi (dok)</i>	1	200.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		<i>Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi (dok)</i>	1	200.000.000	
5	05	02	2,03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	<i>Larantuka, Kupang, Jakarta</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>	1 Dokumen	200.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	<i>Larantuka, Kupang, Jakarta</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>	1 Dokumen	200.000.000	
5	05	02	2,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		<i>Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)</i>	3	150.000.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		<i>Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)</i>	3	150.000.000	
5	05	02	2,04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	<i>Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	3	150.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	<i>Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	1	150.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk tahun 2025 tidak ada usulan dari masyarakat untuk program dan kegiatan masyarakat yang ditujukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 memuat prioritas dan kebijakan pembangunan nasional mengusung tema “***Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***” dimana tahun 2025 merupakan tahun pertama tahapan jangka menengah pertama dalam mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045 yang difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Sesuai dengan tema tersebut diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur mengemban urusan perencanaan pembangunan serta penelitian pada prioritas nasional ke- 7 yakni *Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan* dimana dilaksanakan melalui reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Program yang mendukung diantaranya Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Kebijakan Nasional tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terintegrasi. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijumpai oleh sinergitas pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BAPPERIDA

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Flores Timur,

Tujuan dan sasaran Renja BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur sesuai dengan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III.1**Tujuan dan Sasaran Renja****BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur berdasarkan RENSTRA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun
			2025
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD	Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100
	Meningkatnya hasil kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan	1 dok
	Meningkatnya kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2026 yang diturunkan melalui Surat keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Nomor : BPPPPD. 188. UP/15/Skrt/2024, maka Indikator Kinerja Utama BP4D dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. III.2

Target Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
				2025
1	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	point	82,9
		Persentase ketercapaian indikator kinerja Pemda	%	77,96
1,1	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100
		Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	%	100
1,2	Meningkatnya kualitas pengendalian pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja RPJMD yang tercapai	%	77,96
1,3	Meningkatnya kualitas kelitbangan dan inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100
		Indeks Inovasi Daerah	point	54,41

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renja dalam periode Renstra 2023-2026. Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara mencapai tujuan. Program-program yang merupakan garis besar dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selama satu tahun ke depan merupakan penerjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah dalam upaya tata kelola pemerintahan yang baik yang didasarkan pada arah kebijakan dan permasalahan pelayanan perangkat daerah.

Prioritas dan sasaran pembangunan dalam bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah terlihat dalam dokumen RKPD tahun 2025 yakni pada prioritas Tata kelola pemerintahan yang baik , dengan sasaran (1) meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah (2) meningkatnya inovasi daerah.

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel III.3.

Tabel.III.3
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Nama Perangkat Daerah : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)			Rencana Tahun 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF
1					2			3			4	5	6	7	8	9	10
5-1	5-4	0-0	02		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						3.012.786.150						2.346.396.470
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						1.825.796.150						1.621.738.000
								Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)		100	214.800.000			100	276.216.000		
								Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)		100	1.610.996.150				100	1.345.522.000	
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		3 dokumen (RKPD Penetapan 2026 dan Perubahan RKPD 2025, RPJMD)	1.368.800.000					1.085.658.000	
5	01	02	2,01	01			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Larantuka, Kupang, Jakarta	2 Dokumen	98.000.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		1	61.200.000		

5	01	02	2,01	02			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (dok)</i>	<i>Larantuka, Kupang, Jakarta</i>	1 Dokumen	51.000.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		<i>1 dokumen</i>	<i>26.000.000</i>
5	01	02	2,01	03			Pelaksanaan Konsultasi Publik	<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)</i>	<i>Laarantuka</i>	2 Berita Acara	51.480.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1	41.320.000
5	01	02	2,01	04			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)</i>	<i>Larantuka</i>	3 Berita Acara	35.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1	40.800.000
5	01	02	2,01	05			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota</i>	<i>19 Kecamatan, Larantuka, dan Luar Daerah</i>	4 Berita Acara	183.800.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		<i>1</i>	250.716.000
5	01	02	2,01	06			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)</i>	<i>19 Kecamatan, Kab Flores Timur</i>	1.800 Usulan	31.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1800 usulan	25.500.000
5	01	02	2,01	07			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur</i>	3 Dokumen	970.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	RPJMD	2 dokumen	640.122.000
5	01	02	2,02				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>		<i>1 buku profil</i>	<i>69.996.150</i>			<i>1 buku profil</i>	<i>89.320.000</i>
5	01	02	2,02	03			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>	Larantuka	1	69.996.150	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1	89.320.000
5	01	02	2,03				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)</i>		100	217.000.000			100	280.500.000

5	01	02	2,03	01			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	Larantuka, Kupang	4 Laporan	80.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		4	61.200.000
5	01	02	2,03	02			Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	<i>Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (kerja sama)</i>	Larantuka	15 Kerja Sama	60.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		15	71.400.000
5	01	02	2,03	03			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(laporan)</i>	Larantuka, Kupang, Jakarta	2 Laporan	77.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		2	147.900.000
5	01	02	2,04				Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di BidangPembangunan Daerah (Dok)</i>		2 dok	170.000.000			2 dok	166.260.000
5	01	02	2,04	01			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (dok)</i>	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 Dokumen	85.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1	79.560.000
5	01	02	2,04	02			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dok)</i>	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 Dokumen	85.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1	86.700.000
5	01	03					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
								<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)</i>		100	611.990.000			100	622.307.900
5	01	03	2,01				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)</i>		100	320.000.000			100	249.778.128
5	01	03	2,01	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 Dokumen	40.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1	48.336.000

5	01	03	2,01	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)</i>	<i>Larantuka</i>	13 Laporan	20.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		13	20.548.500
5	01	03	2,01	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (laporan)</i>	<i>19 Kecamatan, Kab Flores Timur</i>	1 Laporan	20.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1	34.034.806
5	01	03	2,01	04			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur</i>	1 Laporan	35.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1	20.548.500
5	01	03	2,01	05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur</i>	1 Dokumen	35.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1	49.287.650
5	01	03	2,01	06			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)</i>	<i>Larantuka</i>	6 Laporan	20.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		6	20.548.500
5	01	03	2,01	07			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah)</i>	<i>Larantuka</i>	6 Laporan	20.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		6	35.925.672
5	01	03	2,01	08			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur</i>	1 Laporan	130.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1	20.548.500
5	01	03	2,02				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang perekonomian dan SDA (%)</i>		100	170.000.000			100	247.266.169

5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)</i>	<i>Larantuka, Kupang, Jakarta</i>	1 Dokumen	35.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		<i>1</i>	48.086.000
5	01	03	2,02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian</i>	<i>Larantuka</i>	4 Laporan	15.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		<i>4</i>	20.548.500
5	01	03	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian</i>	<i>Larantuka</i>	4 Laporan	15.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		<i>4</i>	34.845.202
5	01	03	2,02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur</i>	1 Laporan	25.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		<i>1</i>	20.548.500
5	01	03	2,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur</i>	1 Dokumen	35.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		<i>1</i>	47.836.000
5	01	03	2,02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA</i>	<i>Larantuka</i>	5 Laporan	15.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		<i>5</i>	20.548.500
5	01	03	2,02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA</i>	<i>Larantuka</i>	5 Laporan	15.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		<i>5</i>	34.304.967
5	01	03	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur</i>	1 Laporan	15.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		<i>1</i>	20.548.500
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)</i>		<i>100</i>	<i>121.990.000</i>			<i>100</i>	<i>125.263.603</i>

5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur</i>	1 Dokumen	35.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1	48.781.166
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur</i>	<i>Larantuka</i>	4 Laporan	15.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		4	20.548.500
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur</i>	<i>Larantuka</i>	4 Laporan	15.000.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		4	35.385.437
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>	<i>Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur</i>	1 Laporan	56.990.000	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		1	20.548.500
5	05				Penelitian dan Pengembangan								
5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				575.000.000				102.350.570
						<i>Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)</i>		1	400.000.000				-
						<i>Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)</i>		3	175.000.000			3	102.350.570
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				200.000.000				
5.05.02.2.01.0002					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>	Larantuka, Kupang, Jakarta	1	200.000.000	DAU yan ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan			
5	05	02	2,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi (dok)</i>		1	200.000.000				-

5	05	02	2,03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>	Larantuka, Kupang, Jakarta	1	200.000.000	DAU yan ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan			
5	05	02	2,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)</i>		3	175.000.000			3	102.350.570
5	05	02	2,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	Larantuka, Kupang, Jakarta	3	175.000.000	DAU yan ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan		3	102.350.570

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja sangat penting yakni sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Sedangkan Rencana kerja dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan dokumen rencana kerja resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Pada tahun anggaran 2025 ini terdapat 4 program, 18 kegiatan dengan pagu dana sebesar

Rp. **6.932,369,000** seperti yang terlihat pada tabel IV.1 berikut ini:

Tabel.IV.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Kode					Urusan/BidangUrusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	SumberDana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,RISET DAN INOVASI DAERAH			6.932.369.000,00				6.515.366.485,00
5	01				PERENCANAAN			6.932.369.000,00				6.515.366.485,00
5	01	01			PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.919.583.000,00			x) Penunjang Prioritas	4.210.290.015,00
						Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana aparatur (%)	73,2					
						Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	53,8					
						Persentase perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100					
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	57.000.000,00				57.000.000,00
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.000.000,00	Kab.Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	15.000.000,00
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab.Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	10.000.000,00
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	Kab.Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	17.000.000,00
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000,00	Kab.Flores Timur, Lantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	15.000.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.078.908.000,00				3.167.082.000,00
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32/14 Orang/bulan	2.997.508.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	x)Penunjang Prioritas	3.054.302.000,00
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1Dokumen	71.400.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	87.780.000,00
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	25.000.000,00
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	23.500.000,00				35.000.000,00
5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD							
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1Dokumen	8.500.000,00	Kab.Flores Timur,Larantuka,Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	10.000.000,00
5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						JumlahLaporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	Kab.Flores Timur, Larantuka,Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	10.000.000,00
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	Kab.Flores Timur, Larantuka,Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	15.000.000,00
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	65.000.000,00				56.868.000,00
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah DokumenPendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1Dokumen	5.000.000,00	Kab.FloresTimur, Larantuka,Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	7.000.000,00
5	01	01	2.05	0005	Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai							
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	10.000.000,00	Kab.FloresTimur, Larantuka,Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	11.000.000,00
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40.000.000,00	Kab.FloresTimur, Larantuka,Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	23.068.000,00
5	01	01	2.05	0011	BimbinganTeknisImplementasiPeraturanPerundang-Undangan							

						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	15.800.000,00
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	180.500.000,00				350.252.080,00
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	3.399.000,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	8.820.000,00
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	4.500.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	9.064.000,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	42.350.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	37.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	80.550.724,00
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1Dokumen	2.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	2.164.236,00
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu	2 Laporan	35.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	56.436.900,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	131.179.720,00
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	5.262.500,00
5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1Dokumen	4.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	11.025.000,00
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	60.000.000,00				202.000.000,00
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7Unit	60.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	202.000.000,00
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	163.800.000,00				178.659.200,00
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	2.500.000,00
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	93.359.200,00
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto ryang Disediakan	12 Laporan	82.800.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PAJAK RESTORAN	x)Penunjang Prioritas	82.800.000,00
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	290.875.000,00				163.428.735,00
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak danPerizinannya	18 Unit	60.500.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x)Penunjang Prioritas	80.660.600,00
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	15.000.000,00
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara	15 Unit	15.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	25.000.000,00
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5Unit	100.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	20.768.135,00
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12Unit	7.000.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	11.000.000,00
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kanto ratau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3Unit	105.375.000,00	Kab.FloresTimur,Larantuka, Pukentobi Wangin Bao	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	x)Penunjang Prioritas	11.000.000,00

5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentasi usulan masyarakat yang Diakomodir dalam APBD (%)</i>	100	1.825.796.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	1.580.418.000,00
						<i>Persentase realisasi program RPJMD kedalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)</i>	100					
5	01	02	2.01		<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	-	-	1.368.800.000,00				1.044.338.000,00
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan,dan Isu Strategis Pembangunan Daerah							
						Jumlah DokumenRancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	98.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	61.200.000,00
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya							
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	51.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, SemuaKel/ Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	26.000.000,00
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik							
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	50.480.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, SemuaKel/ Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	41.320.000,00
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah							
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, SemuaKel/ Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	40.800.000,00
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota							
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	2 Berita Acara	183.800.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	250.716.000,00
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan							
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1800 Usulan	31.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	25.500.000,00
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3Dokumen	970.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	640.122.000,00
5	01	02	2.02		<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	-	-	69.996.000,00				89.320.000,00
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota							
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	69.996.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	89.320.000,00
5	01	02	2.03		<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	-	-	217.000.000,00				280.500.000,00
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota							

						Jumlah Laporan Hasil PengendalianPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	61.200.000,00
5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah							
						Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	15 Kerja Sama	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	71.400.000,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	77.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	147.900.000,00
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	170.000.000,00				166.260.000,00
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							
						Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1Dokumen	85.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	79.560.000,00
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							
						Jumlah Dokumen Hasil PenerapanSistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	86.700.000,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)	100	611.990.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	622.307.900,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	320.000.000,00				249.778.128,00
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	48.336.000,00
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							

Kode					Urusan/BidangUrusan/Progr am/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	SumberDana	Prioritas Daerah	PaguIndikatif(Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00	
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	34.034.806,00	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00	
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	49.287.650,00	
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	35.925.672,00	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	130.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	170.000.000,00				247.266.169,00	
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)								

					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.RPJMD dan RKPD)	1Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	48.086.000,00
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPerekonomian						
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	34.845.202,00
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)						
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.RPJMD dan RKPD)	1Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	47.836.000,00
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	34.304.967,00
5	01	03	2.02	0008	KoordinasiPelaksanaanSinergitasdanHarmonisasiPerencanaanPembangunanDaerahBidangSDA						
					JumlahLaporanHasilSinkronisasi Renstra/RenjadenganRKPD/RPJMD pada BidangSDA	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	121.990.000,00				125.263.603,00

Kode					Urusan/BidangUrusan/Progr am/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju RencanaTahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif(Rp)	Lokasi	SumberDana	Prioritas Daerah	PaguIndikatif(Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1Dokumen	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	48.781.166,00	
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat DaerahBidang Infrastruktur	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	35.385.437,00	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisas iPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur							
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	56.990.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	20.548.500,00	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		575.000.000,00				102.350.570,00	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan (Dokumen)	1	575.000.000,00			4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	102.350.570,00
						Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)	3					
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	200.000.000,00				-
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum							
					Jumlah Laporan Hasil PelaksanaanFasilitasi, Pelaksanaan dan EvaluasiPenelitian dan Pengembangan BidangPemerintahan Umum	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	4. Tata kelolaPemerintaha n yangBaik	-	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	200.000.000,00				-
5	05	02	2.03	0002	Penelitiandan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan							

Kode					Urusan/BidangUrusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025					Prakiraan Maju RencanaTahun 2026
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	SumberDana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	-
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	175.000.000,00				102.350.570,00
5	05	02	2.04	0001	Penelitian,Pengembangan,danPerekayasaan di Bidang Teknologi da nInovasi							
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Flores Timur, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	4. Tata kelola Pemerintahan yang Baik	102.350.570,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Flores Timur tahun 2025 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2025. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur akan dilaksanakan pada tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur.

Melalui penyusunan Rencana Kerja BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi BAPPERIDA dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2025. Untuk itu, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, BAPPERIDA Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Tahun 2025.

Larantuka, Juli 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Flores Timur



Apolonia Corebima, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196907181997032002

